

## **EKONOMI POLITIK ORDE BARU, STATUS QUO DAN MASA DEPAN REFORMASI**

Oleh : M. Sihab Ridwan\*

Peristiwa lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 dari singgasana kekuasaan oleh gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah modern Indonesia. Peristiwa itu sekaligus menandai berakhirnya rezim otoriter dan represif yang memegang kendali kekuasaan selama lebih dari 32 tahun.

Selama rezim orde baru berkuasa praktek korupsi, kolusi, nepotisme merambah ke berbagai bidang kehidupan dengan begitu dahsyatnya seolah menjadi jalan hidup. Pelanggaran HAM terjadi dimana-mana mulai dari kasus pembantaian umat Islam di Tanjung Priok semasa Pangab Benny Murdani yang sampai saat ini kasusnya tetap kelam, DOM Aceh, Irian Jaya, Timor-Timur, kasus Nipah Madura, ditahannya sejumlah Tokoh Islam militan, sampai kasus penculikan dan orang hilang. Berbagai pelanggaran HAM tersebut telah membuat citra pemerintah dan ABRI di mata masyarakat dan dunia internasional begitu merosot dan compang-camping.

Kedaulatan rakyat dan supremasi hukum yang seharusnya tegak berdiri kokoh dan terefleksikan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, hanyalah sekedar ilusi yang amat indah. Pemberangusan dan pengebirian hak-hak politik rakyat telah menjadi tontonan yang tidak lucu dan begitu kasat mata selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Penafsiran terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar kehidupan berbangsa cenderung top down, monolitik dan seolah negara sebagai satu-satunya agen tunggal pemegang hak monopoli kebenaran. Tidak terbuka sedikitpun ruang untuk berwacana. Tafsir terhadap

---

\* Penulis adalah Staf Pengajar FE UNTAG Surabaya

Pancasila itu seolah sudah baku dan final. Upaya mensosialisasinyapun cenderung ditempuh cara-cara indoktrinasi.

Demikianlah, selama rezim orde baru memegang tampuk kekuasaan tidak saja catatan kelam bidang politik yang mengemuka, dalam bidang ekonomi misalnya, begitu terkonsentrasinya asset ekonomi hanya pada segelintir kelompok tertentu sementara bagian terbesar masyarakat lainnya, hanya menikmati porsi yang amat terbatas. Puluhan juta rakyat hidup dalam kubang-kubang kemiskinan, segelintir lainnya yaitu para konglomerat itu dengan mudahnya meraup uang yang seharusnya menjadi hak rakyat.

Lebih ironis lagi selain mengusik rasa keadilan masyarakat, berbagai kemewahan yang mereka nikmati banyak diperoleh tidak dengan cara yang fair bahkan sering melalui berbagai fasilitas proteksi, monopoli dan kolusi sehingga perilaku bisnis mereka sering mendistorsi pasar. Akibatnya mekanisme pasar tidak berfungsi dengan semestinya sebagai wahana pengalokasian asset secara efisien dan sekaligus wahana redistribusi / pemerataan asset.

Akibat lebih jauh tentu bisa diduga, inefisiensi terjadi disana-sini yang menimbulkan high cost economy yang menjadi beban bagi perekonomian nasional dan telah mengakibatkan mereka tidak kompetitif di pasar internasional. Rakyat yang seharusnya menikmati barang yang sama dengan harga yang lebih murah terpaksa harus mensubsidi para konglomerat itu dengan membayar harga yang lebih mahal. Begitulah nasib rakyat, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Fenomena konglomerasi seperti diurai diatas itu oleh pakar asing digolongkan sebagai erzat capitalism atau kapitalisme erzat. Suatu bentuk kapitalisme yang berkembang dengan lebih bertumpu pada berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah dan melalui hubungan-hubungan yang berbau kolusi dan bukan pada profesionalisme. Pengamat lain menyebut mereka dengan corny capitalism atau kapitalisme kroni, dimana mereka mendapat berbagai fasilitas dan hak-hak istimewa lainnya karena punya akses terhadap kekuasaan dan berada dalam inner circle (lingkaran dalam) pada pusat-pusat kekuasaan.

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan konglomerasi dengan bisnisnya yang sangat menggurita itu juga tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari paradigma

pembangunan ekonomi orde baru yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan. Tesis “besar dulu baru merembes kebawah” ternyata tidak terbukti. Trickle down effect itu tak kunjung juga menetes. Walhasil, pertumbuhan konglomerasi semakin tak terkendali. Tingkat kesenjangan semakin menganga lebar tidak saja antar berbagai kelompok pendapatan, antara desa-kota tapi juga antara daerah jawa dengan luar jawa.

Dalam konteks ini barangkali relevan kalau Partai Amanat Nasional (PAN) pernah menggagas konsep negara federal untuk mengatasi berbagai kesenjangan terutama antara daerah jawa dengan luar jawa akibat pengambilan keputusan yang terlalu tersentralisir pada pemerintah pusat. Daerah yang kaya akan sumber alam seperti Kalimantan Timur, Aceh dan Irian Jaya, masyarakatnya tetap saja miskin karena kekayaan sumber alam yang mereka miliki diraup pemerintah pusat dan hanya sebagian kecil saja yang dialokasikan kembali ke daerah mereka.

Seiring dengan laju gerakan reformasi yang kian mengerucut dan semakin menemukan bentuknya partai-partai baru pun bermunculan. Akan sangat ideal kalau sebagian dari partai-partai baru ini membangun suatu kekuatan oposisi yang efektif dimana selama rezim Soeharto berkuasa kelompok oposisi selalu dianggap barang haram karena dianggap tidak memiliki pijakan konstitusional serta tidak sesuai dengan budaya bangsa yang didominasi budaya Jawa yang sangat menekankan pada harmoni.

Padahal dalam suatu sistem demokrasi apapun namanya, oposisi merupakan sesuatu yang built in. Tidak ada demokrasi tanpa ada oposisi yang kuat dan dalam kenyataannya di Indonesia berkembangnya kecenderungan diktatorianisme dan otoriterianisme selama 32 tahun kekuasaan Soeharto lebih disebabkan tidak berfungsinya mekanisme check and balances. Sehingga yang terjadi kemudian adalah lahirnya kekuasaan yang begitu absolut dan memusat pada satu orang. Lembaga Kepresidenan seolah begitu sakral dan seakan tak terjamah oleh hukum.

Maka dari sinilah bencana itu berawal. Kini Bangsa ini sedang menuai badai. Setelah terpuruk dalam krisis ekonomi yang entah kapan akan berakhir, kerusuhan demi kerusuhan pun datang silih berganti seakan bangsa ini adalah

bangsa yang gemar berdarah-darah. Mulai dari tragedi kemanusiaan 16 Mei yang menimpa sebagian warga keturunan, kasus pembunuhan ratusan dukun santet dan tokoh lokal agama di Banyuwangi, tragedi Semanggi, hingga kasus Ketapang, Kupang, dan Ambon yang konon agak berbau SARA. Karena itu bangsa ini penting untuk melakukan rekonsiliasi dan pemilu yang baru saja usai diharapkan merupakan suatu entry point bagi penataan kehidupan berbangsa dimasa depan.

### **Masa depan reformasi**

Suhu politik menjelang dan pasca pemilu memang terasa kian panas. Dan “pertarungan” opini tampaknya menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Disinyalir telah terbentuk “Power blok” yang tidak saja masing-masing kelompok itu merepresentasikan berbagai kekuatan sesama kaum reformis tapi juga merepresentasikan kekuatan pro status quo yang berusaha memotong arus reformasi total dan berusaha memecah belah kaum reformis. Melalui sejumlah media yang dikuasai, kelompok-kelompok pro status quo berusaha membentuk opini publik dan bahkan terkadang menditorsi informasi.

Menurut seorang pengamat puluhan partai baru memperlihatkan afliasinya dengan cendana atau kerabatnya. Banyak tokoh masyarakat yang sowan ke Pak Harto dan dalam waktu yang bersamaan dalam masyarakat dibentuk opini yang memojokkan tokoh reformasi sebagai ekstremis yang menghujat Soeharto. Tokoh reformis yang konsisten dan lantang menyuarakan reformasi dan meminta Soeharto dan kroninya diadili malah dianggap menghujat dan diposisikan sebagai orang yang kurang beradab, tidak sesuai budaya timur.

Sampai kapan budaya “lembek” ini akan meracuni bangsa ini. Ketika institusi negara lemah dalam melakukan law enforcement, mestinya kekuatan-kekuatan diluar institusi negara itu lebih nyaring dan bersatu padu dalam mempressure negara, bukan malah melakukan terobosan yang membingungkan dan membuat statement-statement yang menyesatkan yang hanya memperlemah dan memecah belah kaum reformis dan membuat gerakan reformasi itu setback.

Untuk itu penting adanya penyamaan visi dan melakukan aliansi strategis diantara sesama kekuatan reformis. Hanya saja kita perlu melakukan penilaian

kritis dan hati-hati mengenai kelompok mana saja yang bisa dikategorikan reformis dan kelompok mana yang termasuk status quo. Jangan sampai kita terjebak dalam opini yang menyesatkan “asal tidak termasuk barisan orde baru maka otomatis reformis”. Tapi yang terpenting yang perlu dijadikan pijakan analisis adalah komitmennya terhadap tuntutan reformasi. Semua kekuatan politik yang mengklaim dirinya reformis harus bersetuju dan bersedia melaksanakan sejumlah agenda reformasi sebagaimana dituntut mahasiswa dan rakyat yaitu : amandemen terhadap UUD 45, penghapusan dwi fungsi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya, pengadilan terhadap Soeharto, penghapusan praktek KKN, ekonomi kerakyatan, dan penegakan HAM. Tanpa komitmen terhadap hal-hal tersebut kekuatan politik manapun yang berkuasa hanya akan memunculkan orde baru jilid II.

Pasca Pemilu 1999 ini telah terbentuk konfigurasi baru dalam perpolitikan nasional. Ada lima parpol papan atas yang akan saling ‘bertarung’ melalui wakil-wakil mereka di parlemen yaitu: DPIP, GOLKAR, PKB, PPP dan PAN plus PBB, PK, PKU, PKP dan juga tentara yang memperoleh 38 kursi secara gratis. Opini yang terbentuk di masyarakat adalah bahwa berbagai kekuatan politik tersebut kecuali PAN yang memilih untuk menjadi oposisi fungsional dan tentara yang belum jelas kemana arahnya, mengerucut dan terpolarisasi kedalam dua kubu untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Yaitu sayap nasionalis dari kubu PDIP yang didukung PKB dan PKP mencalonkan Megawati sebagai presiden dan sayap islam yaitu PPP, PBB, PK, PKU yang mendukung Habibie sebagai presiden.

Namun belakangan ini muncul poros tengah yang beranggotakan partai-partai Islam dan partai-partai nasional berbasis massa Islam yaitu PAN dan PKB yang ingin memberikan pemikiran alternatif karena semakin meruncingnya pertentangan antara kubu Habibie dengan kubu Megawati.

Terlebih lagi baik Habibie maupun Megawati masih menghadapi sejumlah persoalan. Habibie misalnya walaupun setahun terakhir semenjak ia memegang tampuk kepresidenan telah banyak membuat terobosan seperti melaksanakan pemilu multi partai, kebebasan pers, Timor-timur, pembebasan tapol/napol, dan kurs rupiah yang mulai stabil itu, tapi masa lalu dan citra Habibie yang kental

dengan bayang-bayang Soeharto telah mempersulit posisi dirinya. Yang paling merisaukan kinerja Habibie dalam suatu kasus besar yang telah banyak menyita perhatian berbagai kalangan baik dalam maupun luar negeri yaitu masalah KKN dan pengadilan mantan presiden Soeharto yang juga merupakan amanat MPR boleh dikatakan nol besar.

Demikian juga dengan Megawati masih harus mempertegas sikapnya terhadap sejumlah agenda reformasi. Seperti amandemen terhadap UUD 1945, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, pengadilan terhadap mantan presiden Soeharto dan sebagainya. Juga masalah caleg PDIP yang banyak diprotes kalangan Islam karena sebagian besar konon non muslim, padahal pemilih PDI Perjuangan sebagian besar orang Islam. Belum lagi tantangan dari partai-partai Islam dan sebagian ulama PKB sebagaimana dikatakan Gus Dur yang tidak setuju wanita menjadi presiden dengan alasan syariat agama.

Dalam alam demokrasi pendapat seperti itu sah-sah saja sebagaimana pendapat yang mendukung wanita menjadi presiden, karena Pancasila memang memberi hak hidup bagi pengalaman doktrin agama bagi pemeluknya sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing. Kita harus belajar menghargai keragaman pendapat dalam memahami doktrin agama. Juga kita tidak perlu terburu-buru mengatakan kelompok tertentu memakai isu gender sebagai komoditas politik untuk mengganjar lawan politik, kita harus tetap jernih. Kalau memang hasil ijtihad keagamaan para ulama seperti itu sebagai demokrat kita harus menghormati betapapun kita berpendapat lain. Hanya saja konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini di parlemen Pancasila harus menjadi rujukan utama. Indonesia bukan negara teokratis, karena itu dipersilahkan Megawati maju terus sebagai kandidat Presiden RI ke 4.

## **Penutup**

Kini semua tinggal berpulang pada wakil-wakil rakyat di parlemen siapa pemimpin terbaik yang akan mereka pilih sebagai presiden dan yang bisa menyelamatkan masa depan reformasi. Sepanjang demokratis tentu rakyat akan tetap mendukung siapapun yang terpilih apakah Megawati, Gus Dur, Amien Rais,

atau Habibie. Mungkin saja akan ada massa partai politik yang tidak puas tapi hal itu wajar dan karena itu menjadi tugas para elit partai untuk melakukan pencerahan pada massa pengikutnya bahwa itulah demokrasi. Begitulah realitas politik. Segala kemungkinan apa saja bisa terjadi. Politik merupakan hasil sejumlah kompromi-kompromi. Dan itulah hasil maksimal yang bisa dicapai.

Karena itu jangan sampai kita terjebak dalam seri-seri ketidakpuasan yang tidak akan pernah selesai-selesai yang akhirnya hanya akan menimbulkan suasana chaos dan membuat bangsa ini tidak akan pernah sempat lagi memikirkan masa depannya. (kig).

## Daftar Pustaka

- Handy, Charles. *Era Paradoks: Memahami Masa Depan*. Edisi Indonesia terj. Agus Maulana, 2001, Jakarta : Bina Rupa Aksara.
- Hendra Kusnoto, 2001. *The World's Best Management Practices (Praktek Manajemen Terbaik di Dunia)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- \_\_\_\_\_, 1993. *Harvard Business Review : Putting the Balanced Scorecard to Work*, September-Oktober ; 134-147
- Kaplan, Robert S. dan David P. Norton, 1996. *Harvard Business Review: Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System*, January-February : 73-99.
- Kaplan, Robert S. dan David P. Norton, 2000. *Balanced : Scorecard Translating Strategy in to Action*. Edisi Indonesia terj. Peter R. Yosi Pasla.
- Mulyadi dan Johny Setyawan, 2000. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian, Manajemen, Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan*, Cetakan ke 2, Yogyakarta : Adytia Media.
- Porter, Michael. E, 1992. *Keunggulan Bersaing, Menciptakan. dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. Terj. Agus Dharma, Jakarta: Erlangga.
- Thompson dan Strickland. 1990. *Strategic Management, Concepts and Cases*. Richard D. Irwin.